

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian. Peran pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional terbukti tidak hanya pada situasi normal, tetapi terlebih pada masa krisis.

Dalam pengembangan sektor pertanian di negara kita, kita tidak bisa begitu saja menutup mata dan mengabaikan setiap kendala yang terjadi karena dalam setiap usaha pasti menemui batu kerikil yang menjadi penghambat dalam kemajuan. Begitu pula yang kita lihat pada sektor pertanian di Indonesia banyak sekali kendala atau faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan sektor pertanian misalnya seperti ketersediaan lahan, keterbatasan modal, kondisi iklim yang kurang mendukung dan lain-lain. Perlu kita kaji demi penemuan solusinya dalam penuntasan masalah tersebut.

Pembangunan dan sektor pertanian dapat berjalan berdampingan hanya jika kebijakan perencanaan penggunaan lahan diberlakukan dengan ketat. Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLPPB diharapkan menjadi salah satu kebijakan yang dapat mengatur tentang perencanaan penggunaan lahan, khususnya lahan pertanian pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009, yang dimaksud dengan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Undang-undang ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani dan pemerataan pembangunan pedesaan. Pertanian merupakan sektor unggulan pembangunan nasional hampir di setiap negara berkembang (Suwanti, 2013).

Tujuan inti dari proses pembangunan adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010).

Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi antara lain adalah barang modal, tenaga kerja, teknologi, uang, manajemen, kewirausahaan dan informasi. Dari beberapa faktor tersebut, barang modal merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang modal sendiri dapat dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal (Rahardja & Manurung, 2014).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam APBN untuk nasional dan APBD untuk

daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiscal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004).

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang (pembentukan modal) untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan proses pembangunan disuatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini diartikan dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatnya produksi yang berarti akan meningkatkan PDRB. Sebagai negara berkembang, pertanian tetap sebagai lapangan kerja utama dalam menyerap tenaga kerja.

Menurut BPS Sumatera Utara tahun 2018 penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan yaitu 35,53%, diikuti penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 22,91%, sektor jasa kemasyarakatan sebesar 17,82%, sektor industri sebesar 9,82%, dan selebihnya bekerja di sektor penggalian dan pertambangan, sektor listrik, gas, dan air minum. Besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian

diharapkan dapat meningkatkan PDRB sektor pertanian Sumatera Utara. Berikut tabel perkembangan PDRB sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2018 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertanian (Juta Rupiah)
2004	28893546,79
2005	33486905,07
2006	35807568,45
2007	41010256,67
2008	48871756,56
2009	54431187,77
2010	74701547,96
2011	83707574,79
2012	90538104,08
2013	100013358,03
2014	104363809,89
2015	106450866,32
2016	114854907,61
2017	124848813,27
2018	131893582,23

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2004-2018 mengalami peningkatan. Berdasarkan latar belakang peneliti ingin melihat dan meneliti bagaimana pengeluaran pemerintah, penyaluran kredit sektor pertanian, dan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dimana pertumbuhan ekonominya menggunakan PDRB sektor pertanian sebagai tolak ukur. Dengan judul penelitian **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kredit Sektor Pertanian, dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh kredit sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, kredit sektor pertanian, dan tenaga kerja sektor pertanian secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan di atas, yaitu :

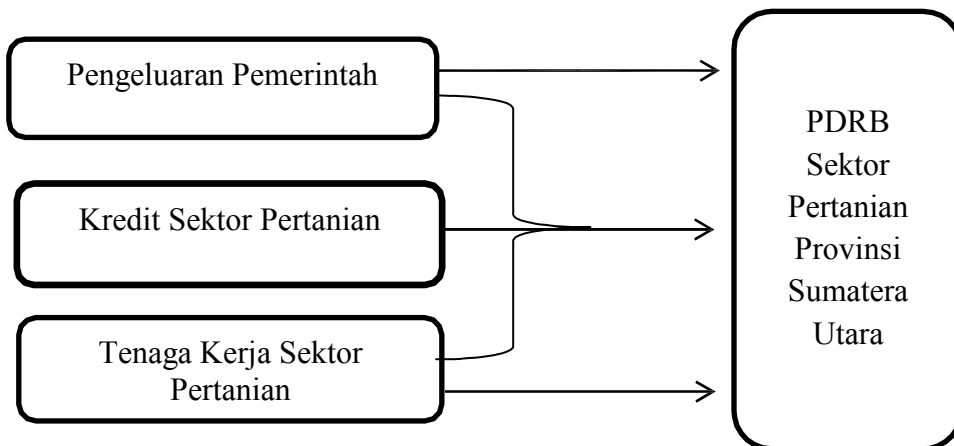
1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara?
2. Untuk mengetahui pengaruh kredit sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara?
3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara?
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, kredit sektor pertanian, dan tenaga kerja sektor pertanian secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas HKBP Nommensen, Medan.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmiah dan menjadi sumber referensi bagi pembaca.

1.5 Kerangka Pemikiran

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian. Dalam penelitian ini digunakan 3 variabel yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB untuk lebih jelasnya berikut kerangka pemikiran penelitian:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kredit Sektor Pertanian, dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004-2018.

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang ada, yang diajukan oleh peneliti yang kemudian diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
2. Diduga kredit sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
3. Diduga tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
4. Diduga pengeluaran pemerintah, kredit sektor pertanian, dan tenaga kerja sektor pertanian secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah. PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan kecenderungan akan menurun (Sudiana, 2015). Gejala pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu PDRB karena PDRB menggambarkan aktivitas perekonomian yang dapat dicapai pada satu periode dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas SDM melalui pendidikan (Wijayanti, 2014).

Menurut Kaur (2016), pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh teknologi dan pengetahuan yang bukan hanya di atas faktor fisik. Pertumbuhan ekonomi harus dipertahankan bagi negara sedang berkembang untuk memutuskan lingkaran kemiskinan (Nworji, et all. 2012). Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai SDM yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya, sehingga dengan sendirinya akan menguasai perekonomian dunia. Dalam kaitan ini, salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan

yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Peningkatan SDM berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan (Pervez, 2014).

Menurut Sukirno (2011), pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi saja, lebih dari itu pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk kemajuan sisi materiel dan spritual manusia.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dan jasa dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (BPS 2016).

Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi.

Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005).

Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Nasution (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, serta Tenaga Kerja.

Vidyattama (2010) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia, antara lain modal manusia (human capital), belanja pemerintah daerah, infrastruktur dan perdagangan terbuka (openness trade).

Menurut BPS (2016), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Dari data PDRB ini berguna untuk:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.
4. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
5. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Menurut Tarigan (2004), cara untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit pendekatan produksi dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu: Pertanian,

Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan, PDRB ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.

Tiga pendekatan yang telah dijelaskan diatas merupakan metode langsung dalam menghitung angka-angka PDRB, adapun metode tidak langsungnya dalam menghitung angka-angka PDRB. Metode tidak langsung merupakan metode penghitungan alokasi yakni dengan cara mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi ataupun sebaliknya yakni PDRB provinsi menjadi PDRB kabupaten atau kota dengan menggunakan berbagai indikator produksi maupun indikator lainnya yang sesuai sebagai alokator (Sukirno, 2000).

Metode alokasi ini terkadang terpaksa dipakai dalam memperkirakan data provinsi serta kabupaten atau kota untuk jenis kegiatan tertentu yang mana memiliki sistem pelaporan terpusat atau cabang usaha yang memiliki kantor pusat di daerah lain (Pratiwi, et all. 2016).

Dalam menghitung angka-angka PDRB menggunakan metode tidak langsung ini alokator yang dapat dipakai didasarkan pada nilai produksi, jumlah produksi, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya yang dianggap sesuai dengan daerah tersebut.

2.1.2 Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri (Latumaerissa, 2015).

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternakan (Putong, 2005).

Pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian, peranan penting dari sektor pertanian itu sendiri adalah dalam membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor (Tambunan, 2006).

Menurut analisis Klasik dari Kuznets sektor pertanian di negara-negara sedang berkembang merupakan suatu sektor ekonomi yang sangat potensial, terdapat 4 bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu sebagai berikut (Tambunan, 2006):

1. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi non pertanian sangat tergantung pada produk-produk dari sektor pertanian, bukan saja untuk kelangsungan pertumbuhan suplai makanan tetapi juga untuk penyediaan bahan baku untuk keperluan kegiatan produksi di sektor-sektor non pertanian tersebut.
2. Karena kuatnya bias agraris dari ekonomi selama tahap-tahap awal pembangunan, maka populasi di sektor pertanian daerah pedesaan membentuk suatu bagian yang sangat besar dari pasar permintaan domestik terhadap produk-produk dari industri dan sektor-sektor lain di dalam negeri, baik untuk barang-barang produsen maupun barang-barang konsumen, kuznets menyebutnya kontribusi pasar.
3. Karena relatif pentingnya pertanian bisa dilihat dari sumbangan out-put nya terhadap pembentukan produk domestik bruto dan andilnya terhadap penyerapan tenaga kerja tanpa bisa dihindari menurun dengan pertumbuhan atau semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi.
4. Sektor pertanian mampu berperan sebagai salah satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran, baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau peningkatan produksi komoditi-komiditi pertanian menggantikan impor.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran

pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/ hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga.

Rika dan Susi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah khususnya dalam pengeluaran investasi, berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sering dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memainkan peran sebagai salah satu penggerak utama (prime mover) dalam perekonomian, sehingga ketika perekonomian sedang mengalami kelemahan akibat adanya resesi ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah melalui kebijaksanaan yang dimiliki dapat tampil menyelamatkan keadaan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanja defisit, atau sebaliknya.

Sebagai negara berkembang yang mana peran pemerintah dalam perekonomian relatif besar, pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian Indonesia. Dalam teori pertumbuhan baru terdapat penekanan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia, hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pengeluaran untuk pendidikan (Susilowati dan Suliswanto, 2015). Sedangkan pengeluaran pemerintah yang salah satunya adalah untuk pembangunan infrastruktur merupakan sebuah bentuk dari investasi yang tidak mencari keuntungan melainkan untuk kelancaran roda ekonomi masyarakat (Kusuma, 2016).

Identitas keseimbangan pendapatan nasional ($Y = C + I + G + X - M$) merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Disamping itu pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

Sukirno (2000) menyatakan pengeluaran pemerintah dapat dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karna pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja.

Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu (1) pajak yang diharapkan akan diterima (2) pertimbangan-perimbangan politik, dan (3) persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Sedangkan Wijaya (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah maupun efek penggandaan (multiplier effect) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (full employment).

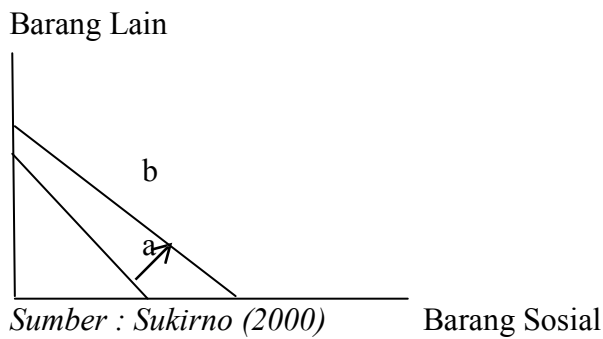
Pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang mana suatu tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional serta APBD untuk daerah atau regional. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal ialah dalam

rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja serta memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000).

Todaro dan Smith (2004) menyebutkan bahwa pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan didalam upaya pengelolaan perekonomian nasional atau daerah. Melalui pengeluaran belanja pemerintah dapat mengalokasikan dana tersebut guna membiayai penyediaan berbagai fasilitas sosial yang enggan dilakukan oleh pihak swasta.

Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan dengan dua cara yang terpisah, yakni melalui pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang itu merupakan bagian dari permintaan agregat serta pajak dan transfer berpengaruh terhadap hubungan antara output serta pendapatan (Y). Transfer ke daerah merupakan dana yang mana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Dornbusch dan Fisher (1999) menegaskan bahwa perubahan dalam hal pengeluaran pemerintah serta pajak nantinya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan suatu kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Apabila perekonomian berada dalam resesi, maka pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan, ini berguna untuk menaikkan output. Namun ketika berada pada masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi untuk dapat kembali pada penggunaan tenaga kerja penuh. Berdasarkan teori, efek pengeluaran pemerintah jikalau dihubungkan dengan konsep budget line dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Perubahan Budget Line Karena Adanya Pengeluaran Pemerintah.

Awalnya dengan anggaran tertentu yakni pada area konsumsi yang berada pada pilihan yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya pengeluaran pemerintah untuk barang sosial, misal : subsidi untuk meringankan sekolah membuat garis anggaran bergerak ke kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah ini mampu memperluas pilihan manusia.

Ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah, hal ini dikarenakan peningkatan agregat demand akan mampu mendorong kenaikan investasi, kemudian akhirnya akan meningkatkan produksi.

2.1.4 Kredit

Suatu usaha akan membutuhkan modal secara terus-menerus untuk mengembangkan usaha yang menjadi penghubung alat, bahan dan jasa yang digunakan dalam produksi untuk memperoleh hasil penjualan (Nugraha dan Listyawan, 2011). Wicaksono (2011), menyatakan bahwa faktor modal memberikan pengaruh terhadap pendapatan, karena ketersediaan modal akan memaksimalkan skala usahanya. Modal akan berpengaruh terhadap tingkat produksi yang dihasilkan

(Ningsih, et all. 2015). Lebih lanjut (Putri, et all. 2017), menyatakan bahwa modal juga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan seseorang.

Modal merupakan semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output (Hentiani, 2011). Tani (2013), menyatakan modal yang merupakan salah satu faktor produksi akan menentukan produktivitas perusahaan yang berdampak terhadap pendapatan. Wirawan, et all. (2015) dan Parinduri (2016), menyatakan bahwa semakin besar modal yang dimiliki oleh seorang pengusaha maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh.

Lembaga keuangan sebagai akses kredit bagi petani berperan untuk membiayai input produksi hingga pasca panen sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya. Petani yang mengalami keterbatasan modal tidak mampu melakukan usahatani secara optimal. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan akses lembaga keuangan memberikan kesempatan pada petani untuk mampu membeli input produksi untuk meningkatkan nilai produksi petani dan selanjutnya berdampak pada tingkat pendapatan usahatani (Rahman dan Chamelia, 2014; Iski dan Harianto, 2016; Sekyi dan Akegbe 2017).

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 12 ayat 1 “kredit adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Sebagai salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, sektor pertanian masih menghadapi beberapa kendala diantaranya adalah minimnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu model pembiayaan yang mampu memberikan stimulus kepada para pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan produksinya, mayoritas petani di Indonesia yang hanya memiliki usaha dalam skala kecil, yaitu sektor pertanian pada umumnya masih mengandalkan modal sendiri dalam pengembangan usahanya (Beik, 2013).

Sektor pertanian sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini. Kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Kendala akses pada lembaga keuangan formal memperparah kondisi kemiskinan karena menyebabkan para petani terjebak kepada praktik money lender. (Prayoga, et all. 2017).

Lembaga keuangan formal, seperti perbankan pun belum bisa diandalkan sebagai penyalur pembiayaan pertanian. Perbankan Indonesia terlihat kurang berpihak terhadap sektor pertanian, dimana jumlah pembiayaan yang disalurkan bagi sektor pertanian hanya 5,2 persen (BI 2012).

Selain itu, masalah bankability dan persepsi kalangan perbankan yang menganggap pertanian sebagai high risk industry, merupakan dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan

pada sektor pertanian. Sementara lemahnya akses petani kecil terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan persyaratan yang tidak sederhana yang harus dipenuhi oleh petani. Di sisi lain pihak perbankan sendiri kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian yang dipandang berisiko tinggi, baik karena gangguan alam seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, maupun fluktuasi harga (Beik, 2013).

Salah satu kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah untuk mengatasi kesulitan aksesibilitas kredit bagi usaha tani kecil adalah kebijakan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Sasaran utama penerima kredit ini adalah (a) petani tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan sorgum, (b) petani hortikultura meliputi bawang merah, cabai, kentang, jahe, dan pisang, (c) petani perkebunan budidaya tebu, (d) peternak sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras, ayam buras, itik, dan burung puyuh, (e) koperasi untuk pengadaan gabah, jagung, dan kedelai (Kementan 2015).

Pemerintah menanggung sebagian bunga atas kredit yang disalurkan oleh bank pelaksana kepada usaha tani yang mengakses KKP-E. Subsidi bunga dibayarkan kepada bank pelaksana berdasarkan jumlah KKP-E yang disalurkan. Bank pelaksana adalah bank umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan KKP-E kepada calon peserta KKP-E. Dana yang disalurkan untuk KKP-E merupakan dana bank itu sendiri, bukan dana pemerintah. Dengan demikian, maka bank pelaksana bertindak sebagai *executing agency*. Usaha tani dapat mengajukan KKP-E secara individu atau melalui kelompok tani.

Usaha tani diharapkan dapat menggunakan KKP-E yang diperolehnya untuk keperluan modal usaha baik untuk keperluan pengadaan input produksi maupun pengadaan sarana produksi. KKP-E ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 dan peraturan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian tentang pelaksanaan KKP-E telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir dengan Permentan No.12/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

Bank pelaksana KKP-E berjumlah 22 bank yang terdiri dari 8 bank umum yaitu Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, CIMB Niaga, Agroniaga, BCA, dan BII; serta 14 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Papua, Riau, dan Nusa Tenggara Barat (Kementan 2015). Namun sejak tahun 2016 KKPE tidak lagi dilanjutkan, namun berganti menjadi skim KUR Sektor Pertanian.

A.T Mosher telah menganalisa syarat-syarat pembangunan pertanian dibanyak negara dan menggolongkannya menjadi syarat mutlak dan syarat pelancar. Terdapat lima syarat yang tidak boleh tidak ada untuk adanya pembangunan pertanian. Kalau satu saja syarat tersebut tidak ada, maka berhentilah pembangunan pertanian, pertanian dapat berjalan terus tetapi sifatnya statis. Syarat-syarat mutlak yang harus ada dalam pembangunan pertanian (Mosher, 1965):

1. Adanya pasar untuk hasil usaha tani
2. Teknologi yang senantiasa berkembang

3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara local
4. Adanya peransang produksi bagi petani
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan continue

Dan syarat-syarat pelancar pembangunan pertanian adalah:

1. Pendidikan pembangunan
2. Kredit produksi
3. Kegiatan gotong royong petani
4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian
5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian

Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat juga bagi sektor pertanian, alasannya karena pendapatan tidak mencukupi, sehingga tren penyaluran kredit cenderung naik khususnya pada lembaga keuangan bank. Seiring berkembangnya zaman kebutuhan masyarakat terus meningkat dan diperhadapkan dengan sumber pendapatan tidak mencukupi sehingga kredit menjadi salah satu alternatif yang paling dinikmati masyarakat dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan setiap hari (Irianto, 2012).

Penyaluran kredit diberikan kepada nasabah secara selektif, karena lembaga keuangan ini juga tidak dapat mengalami kerugian jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan. Sejumlah progam pemerintah terkait dengan usaha memberdayakan ekonomi rakyat dan sektor pertanian telah dilaksanakan diberbagai daerah dengan tujuan yang sama, namun dengan sasaran yang berbeda. Keseluruhan kebijakan pembiayaan ini dimaksudkan untuk mempercepat gerakan ekonomi rakyat dan mendorong proses produksi pertanian (Ronga, 2015).

Menurut Indriastuti (2005) kontribusi kredit perbankan terhadap sektor pertanian masih sangat rendah meskipun bidang tersebut sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Tingginya persepsi resiko menjadi penyebab rendahnya kredit pada sektor pertanian. Kondisi minimnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kredit bermasalah sewaktu mengucurkan kredit pertanian; (2) aturan BI yang cukup ketat agar bank prudent (kehatihatian) dalam penyaluran dana, serta (3) banyak bank khususnya bank besar tidak memiliki pengalaman menyalurkan kredit. Pembiayaan usaha disektor pertanian yang ada saat ini, hampir semua berbasis perhitungan bunga.

Untuk pembentukan modal, pemerintah maupun swasta telah cukup banyak membuka kesempatan melalui berbagai kegiatan perbankan dalam bentuk kredit. Dengan surat bukti pemilikan tanah petani dapat berurusan dengan bank untuk mendapat kredit, namun masih langka. Bank yang banyak membantu adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Bumi Daya. Macam kredit yang diberikan dan direalisasikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) antara lain:

1. Kredit Investasi besar
2. Kredit Investasi Kecil
3. Kredit Bantuan Proyek

Pemerintah telah melakukan upaya menyediakan permodalan bagi petani seperti Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-

RP), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL dari penyisihan laba BUMN), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pola penjaminan, skim kredit komersial.

Kepala OJK R5 Lukdir Gultom menyatakan bahwa perbankan di Sumut fokus pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat sehingga realisasi KUR di Sumut selama tahun 2017 mencapai Rp 4,28 T. Sedangkan secara regional Sumut dan Sumbar masuk dalam 10 provinsi dengan penyaluran KUR terbesar selama tahun 2017 dengan persentase pertumbuhan KUR regional sebesar 4,16%.

2.1.5 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi pendapatan. Tenaga kerja merupakan faktor penggerak faktor input yang lain, tanpa adanya tenaga kerja maka faktor produksi lain tidak akan berarti. Pengalaman kerja seseorang akan mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja akan mendorong peningkatan produksi sehingga pendapatan pun akan ikut meningkat, semakin banyak tenaga kerja yang bekerja maka pendapatan juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sumarsono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan.

Tingkat produktivitas juga akan dipengaruhi oleh jam kerja (Chintya dan Darsana, 2013). Hasil penelitian ini juga di dukung oleh Yuniartini (2013) yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan.

Tenaga kerja adalah seorang penduduk yang memiliki usia kerja. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa seorang tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk masyarakat sekitar. Secara keseluruhan penduduk dalam suatu pemerintahan atau negara memiliki dua kelompok yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Usia yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia berumur 15 sampai 64 Tahun. Jadi setiap orang yang mampu atau bisa bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja diklasifikasikan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan seorang penduduk yang memiliki usia produktif 15-64 tahun baik yang ingin mencari kerja, belum bekerja ataupun yang sudah bekerja. Yang kedua adalah bukan angkatan kerja adalah seorang penduduk yang memiliki usia lebih dari 10 tahun yang berkegiatan seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kategori ini adalah seperti mahasiswa, anak sekolah, ibu rumah tangga atau pengangguran sukarela. Secara kualitas juga klasifikasi dari tenaga kerja dibedakan menjadi tiga diantaranya.

1. Tenaga Kerja Terlatih, tenaga kerja jenis ini mempunyai suatu kelebihan dalam pengalamannya seperti apoteker, mekanik dan ahli bedah.
2. Tenaga Kerja Terdidik, tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dari pendidikan yang ia jalani baik itu formal atau non formal, pengacara, guru dan dokter.
3. Tenaga Kerja Tidak Terlatih dan Tidak Terdidik, jenis ini seperti pekerja kasar yang mengandalkan tenaga yang dimiliki seperti buruh angkut, asisten rumah tangga dan kuli.

Menurut Alam S. tenaga kerja ialah penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun.

Tenaga kerja (man power) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke 43 atas. Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih (BPS). BPS (2006) mendefinisikan beberapa konsep tentang Tenaga Kerja, antara lain : (1.) Mencari pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran. (2.) Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus. (3.) Penghasilan mencakup upah/ gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/ barang. (4.) Hari kerja adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus. (5.) Jam kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja. (6.) Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah kegiatan dari mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang

lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok. Termasuk juga yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Tujuan pemilihan batas umur adalah agar defenisi yang diberikan dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda. Batasan umur yang digunakan di Indonesia saat ini adalah 10 tahun ke atas. Tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Secara umum pengukuran ketenagakerjaan dapat didekati dengan dua cara, yaitu : (1) gainful worker approach dan (2) labour force approach. Dalam gainful worker approach, seseorang yang dikategorikan tenaga kerja akan ditanyakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seseorang yang biasanya sekolah, tetapi saat survey sedang mencari pekerjaan, maka gainful worker approach akan dimasukkan dalam kategori sekolah maka informasi mengenai pengangguran banyak yang hilang.

Konsep angkatan kerja yang digunakan di Indonesia dalam pengumpulan data ketenagakerjaan adalah labor force approach yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan penduduk bukan usia kerja (bukan

tenaga kerja). Selanjutnya penduduk penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukan, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berkaitan dengan konsep tersebut, penduduk yang digolongkan pada kelompok angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang digolongkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain. Teori pertumbuhan Adam Smith juga menjelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan penambahan penduduk maka akan terdapat penambahan output/ hasil.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Suatu kesempatan kerja akan tercipta ketika terjadi permintaan akan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang besar dalam jangka pendek bergantung pada besarnya efektifitas permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan substitusi antara tenaga kerja serta faktor produksi yang lain, elastisitas

permintaan akan hasil produksi, dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya (Suryono, 2010).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan secara berkelanjutan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi (Suryono, 2010). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara keduanya.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Keadaan demikian, penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja (Todaro dan Smith, 2004).

Yang termasuk dalam tenaga kerja sektor pertanian adalah tenaga kerja manusia, tenaga kerja mekanik, dan tenaga kerja ternak. Tenaga kerja manusia terdiri dari tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Tenaga kerja ternak digunakan untuk

pengolahan tanah dan angkutan. Sedangkan tenaga kerja mekanik bersifat subsidi pengganti tenaga kerja manusia atau tenaga kerja ternak. Banyak dari penduduk Indonesia merupakan tenaga kerja pada sektor pertanian. Oleh karena itu petani sebagai sumber daya manusia, memegang peranan inti di dalam pembangunan pertanian. Peranan petani adalah memelihara tanaman dan hewan guna mendapatkan hasil-hasilnya yang bermanfaat serta mempelajari dan menerapkan metode baru yang diperlukan agar usaha taninya lebih produktif (Mosher, 1968).

Dalam usaha tani sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga petani sendiri yang terdiri atas ayah sebagai kepala keluarga, isteri, dan anak-anak petani. Anak-anak berumur 12 tahun misalnya sudah dapat dikatakan sebagai tenaga kerja produktif bagi usaha tani. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani ini merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dalam uang. Memang usaha tani dapat membayar tenaga kerja tambahan misalnya dalam tahap penggarapan tanah baik dalam bentuk pekerjaan ternak maupun tenaga kerja langsung. Sedangkan tenaga kerja usaha tani di luar keluarganya diperoleh dengan cara (Hernanto, 1989):

1. Upahan

Cara ini bervariasi di setiap tempatnya, upah umumnya tidak rasional hal ini disebabkan daya mampu tidak diukur secara jelas, tetapi dihitung sama untuk setiap tenaga kerja. upah pria berbeda dengan wanita maupun anak-anak. Begitu juga berbeda upah untuk satu dan lain pekerjaan. Untuk tenaga ternak dan operatornya berdasarkan hari kerja untuk satu tahapan pekerjaan. Untuk upah

tenaga mekanik hampir sama dengan tenaga ternak. Pembayaran upah tersebut dapat harian atau mingguan sesuai dengan hasil kerjanya bahkan borongan.

2. Sambatan

Sistem tolong-menolong antar petani tanpa dasar pertimbangan ekonomi

3. Ansun Tenaga Kerja

Peserta arisan akan mengembalikan dalam bentuk tenaga kerja pada anggota lain.

Petani sebagai pemilik, petani penggarap, dan petani buruh. Pada umumnya petani pemilik sebagai majikan yang tanahnya digarap oleh orang lain (petani penggarap), sehingga ia berperan sebagai pengelola dalam usaha taninya. Sedangkan petani buruh mempunyai keterampilan bercocok tanam sebagai juru tani dalam keterampilan tangan, otot, dan mata.

Salah satu faktor yang menjadi lingkaran setan adalah faktor kemiskinan. Dari data yang dikumpulkan jelas bahwa mereka yang mempunyai pendidikan rendah adalah golongan buruh tani yang tidak bertani. Demikian pula daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, maka tingkat pendidikan masyarakat daerah itu sangat rendah. Dalam hubungan kerja antara majikan atau penggarap dengan buruh, ditentukan sistem upah yang akan dipakai, besar dan bentuk upah, jam kerja perhari kerja, satuan kegiatan, upah perhari kerja dan upah per satuan kegiatan. Kesepakatan bersama antara majikan dan buruh tani cukup dilakukan secara lisan saja.

Menurut cara pembayarannya kepada buruh tani ada dua macam upah, yaitu upah borongan dan upah harian. Pembayaran upah borongan didasarkan pada satuan hasil kerja. Sedangkan pembayaran upah harian didasarkan pada jumlah hari buruh

tani bekerja. Tingkat upah di pedesaan diduga dipengaruhi oleh kebutuhan dasar minimum (subsistence needs) atau oleh mekanis passer tenaga kerja (Malik, 2013).

Di negara-negara yang sudah maju, kemajuan pertanian diukur dengan tingginya produktivitas tenaga kerja dan semua usaha diarahkan untuk meningkatkan produktivitas itu. Sedangkan Indonesia, prinsip yang demikian tidak selalu cocok dengan keperluan. Kalau di negara-negara maju, tenaga kerja sangat terbatas sedangkan di Indonesia banyak penduduk sebagai tenaga kerja pada sektor pertanian. Dalam mengatasi terbatasnya tenaga kerja, di negara maju ditemukan mesin-mesin “penghemat tenaga kerja” untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas pertanian pada umumnya. Intensitas penyerapan tenaga kerja berhubungan positif dengan produktivitas tanah pertanian. Disamping itu, untuk periode satu tahun penyerapan tenaga kerja pertanian dipengaruhi oleh pola dan intensitas tanam.

Masalah ketenagakerjaan pedesaan di Indonesia sering menemui kesulitan karena kerumitannya. Pekerja di pedesaan pada umumnya melakukan jenis pekerjaan lebih dari satu sehingga tidak dapat dipisahkan secara tegas. Sebagai contoh, seorang yang bekerja sebagai petani juga bekerja sebagai tukang, kuli, dan pedagang. Sering kali dua pekerjaan dikerjakan pada saat yang hampir bersamaan, misalnya pedagang barang kebutuhan sehari-hari, sambil menunggu pembeli mereka melakukan pekerjaan menjahit atau pekerjaan lainnya. Sebagai langkah pertama dalam menelusuri keterlibatan seseorang dalam suatu pekerjaan, secara bertahap dibuat pembedaan antara sektor pertanian, sektor non-pertanian, dan campuran antara sektor

pertanian dan non-pertanian. Dengan melihat proporsi tersebut dicoba untuk melihat besarnya keterlibatan tenaga kerja pada masing-masing sektor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan review penelitian terdahulu, berikut review yang peneliti kumpulkan:

No	Peneliti /Tahun	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	Vidyattama/ 2010	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan PDRB di Indonesia	Analisis Regresi berganda	Y= PDRB Indonesia X1=Investasi X2= Modal Manusia X3= Populasi X4= Belanja Pemerintah Daerah X5=Infrastruktur X6=Perdagangan Terbuka	Investasi dan populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Indonesia. Belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di Indonesia. Modal manusia, infrastuktur, dan perdagangan terbuka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di Indoneasia.
2.	Gusti Ayu Putu Ambara Ratih, Made Suyana Utama, dan I Nyoman Mahendra Yasa/ 2017	Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah	Analisis statistik deskriptif, analisis jalur (Path Analysis) dengan Partial Least Square PLS (component based SEM)	Y1= PDRB Y2= Tingkat Kemiskinan X1= Investasi X2= Pengeluaran Pemerintah X3=Tenaga Kerja	Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. Tenaga kerja berpengaruh positif dan nonsignifikan terhadap

		Sarbagita Di Provinsi Bali			<p>Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali</p> <p>Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali.</p> <p>Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali.</p> <p>Tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali</p>
3.	Yozi Aulia Rahman, Ayunda Lintang Chamelia/2014	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012	analisis regresi Ordinary Least Square (OLS)	$Y = \text{PDRB}$ $X_1 = \text{Tabungann}$ $X_2 = \text{Posisi kredit}$ $X_3 = \text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}$ $X_4 = \text{Realisasi Belanja Daerah}$	<p>Ke empat variabel tersebut berhungan positif terhadap PDRB Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.</p> <p>Berdasarkan simpulan maka diperoleh implikasi kebijakan bahwa terkait dengan belanja daerah, pemerintah daerah harus konsisten merealisasikan anggaran yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan secara agregat dapat meningkatkan PDRB Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.</p>
4.	Ahmad	Pengaruh	Model	$Y = \text{PDRB}$	Investasi berpengaruh

	Jazuli Rahman//2016	Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten /Kota Di Provinsi Banten 2010-2014	Regresi Data Panel	X1= Investasi X2= Pengeluaran Pemerintah X3= Tenaga Kerja	positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Banten. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Banten. Tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB Provinsi Banten.
5.	Evi Safira, Mohd. Nur Syechalad, Asmawati, Eva Murlida /2018	Pengaruh PMDN, PMA, Tenaga Kerja Dan Luas Lahan Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh.	Model analisis regresi linear berganda berdasarkan metode OLS (Ordinary Least Square).	Y= PDRB Sektor Pertanian X1= PMDN X2= PMA X3= Tenaga Kerja X4= Luas Lahan	PMDN berpengaruh positif terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Aceh PMA dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Aceh. Luas lahan berpengaruh negatif terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Aceh

6.	Sayifullah, Emmalian/2018	Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia.	Model analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS)	Y= PDRB Sektor Pertanian di Indonesia. X1= Tenaga kerja sektor pertanian X2= Pengeluaran pemerintah	Variabel tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia variabel tenaga kerja sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia
7.	Muhammad Syarif dan Baheri/2017	Analisis Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara	Regresi Berganda	Y= PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. X = Kredit Perbankan	1) Dalam skala provinsi, pengaruh kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tidak signifikan, sedangkan kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. 2) Secara sektoral: kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor listrik dan sektor konstruksi (pada taraf kepercayaan 5 persen).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melakukan kajian terhadap keterkaitan hubungan/pengaruh antar variabel dependen dan variabel independen. Dimana variable independennya adalah pengeluaran pemerintah, kredit sektor pertanian, dan tenaga kerja sektor pertanian sedangkan variable dependennya adalah Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka dan datanya diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya. Data yang dikumpulkan sebagai dasar pengkajian penelitian ini merupakan data runtun waktu (time series) berupa data pertahun yang dikumpulkan dari tahun 2004-2018 dengan pertimbangan bahwa pada masa tersebut sudah dapat mewakili laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian Sumatera Utara.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (library search), yaitu penelitian yang dilakukan dengan bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah dan laporan-laporan penelitian ilmiah yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah pencatatan langsung berupa data seri waktu (time series) dalam kurun waktu 15 tahun (2004-2018).

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses penyederhanaan dalam proses yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode yang dipilih dalam analisis data harus sesuai dengan pola penelitian dari variabel yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mode analisis bivariate (regresi linear sederhana) dan model analisis multibivariate (regresi linear berganda).

3.3.1 Model Analisis Bivariate

Untuk menyelesaikan masalah 1, 2, dan 3 maka analisis yang digunakan adalah analisis bivariate (analisis regresi sederhana) karena variabelnya hanya ada dua. Analisis bivariate digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variable bebas (X_i) terhadap variabel terikat (Y).

Tahapan pengujian hipotesis menggunakan analisis bivariate ditempuh dengan langkah menentukan persamaan regresinya adalah :

$$Y = a + b_i X_i + e \dots \dots \dots (1)$$

Model persamaan (1) diatas adalah persamaan linear, sehingga untuk memperbolehkan model pada persamaan (1) menjadi non-linear persamaan dirubah menjadi double log atau seperti persamaan dibawah ini (2).

$$\text{Log } Y = \text{log } a + b_i \text{ log } X_i + e \dots \dots \dots (2)$$

Dimana hasil pendugaan parameter b_i menunjukkan, bahwa setiap peningkatan X_i sebesar 1% akan meningkatkan Y sebesar $b_i\%$, sehingga persamaan (2) diturunkan menjadi persamaan dibawah ini atau persamaan (3).

$$Y = a X_i^{b_i} \dots\dots\dots(3)$$

dimana :

Y = PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara (Juta Rupiah), nilai riil dengan tahun dasar 2010

a = Konstanta

b = Koefisien X_i

i = Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah), Penyaluran Kredit Sektor Pertanian (Juta Rupiah), dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Jiwa)

Hipotesis:

H_0 : $\beta_1 = 0$, Pengeluaran pemerintah (belanja modal), penyaluran kredit sektor pertanian, dan tenaga kerja sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap PDRB Sumatera Utara.

H_1 : $\beta_1 \neq 0$, Pengeluaran pemerintah (belanja modal), penyaluran kredit sektor pertanian, dan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh terhadap PDRB Sumatera Utara.

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi variable independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) maka menggunakan uji statistik diantaranya: uji parsial (uji t) dan analisis koefisien determinansi (R^2).

3.3.2 Model Analisis Multivariate

Untuk menyelesaikan masalah 4 maka analisis yang digunakan adalah model analisis multivariate (analisis regresi linear berganda) karena variabelnya lebih dari

dua. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap variabel terikat (Y).

Tahapan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda ditempuh dengan langkah menentukan persamaan regresinya adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(4)$$

Model persamaan (4) diatas adalah persamaan linear, sehingga untuk memperbolehkan model pada persamaan (4) menjadi non-linear, sehingga persamaan dirubah menjadi double log atau seperti persamaan (5) dibawah ini:

$$\text{Log } Y = \text{log } a + b_1 \text{ log } X_1 + b_2 \text{ log } X_2 + b_3 \text{ log } X_3 + e \dots\dots\dots(5)$$

Dimana hasil pendugaan parameter b1 menunjukkan, bahwa setiap peningkatan X1 sebesar 1% akan meningkatkan Y sebesar b1, sehingga persamaan (5) diturunkan menjadi:

$$Y = aX_1^{b_1} + aX_1^{b_2} + aX_1^{b_3} \dots\dots\dots(6)$$

dimana :

Y = PDRB Sektor Pertanian Sumatera Utara (Juta Rupiah), nilai riil dengan tahun dasar 2010

a = Konstanta

b1 = Koefisien X1

b2 = Koefisien X2

b3 = Koefisien X3

X1 = Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah), nilai riil dengan tahun dasar 2010

X2 = Penyaluran Kredit Sektor Pertanian (Juta Rupiah), nilai riil dengan tahun dasar 2010

X3 = Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Jiwa), nilai nominal

Hipotesis:

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = 0$, Pengeluaran pemerintah (belanja modal), penyaluran kredit sektor pertanian, dan tenaga kerja sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian Sumatera Utara.

H1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, Pengeluaran pemerintah (belanja modal), penyaluran kredit sektor pertanian, dan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian Sumatera Utara.

3.3.3 Analisis Uji Parsial (T-Test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut:

H0 : $\beta_1 = 0 \rightarrow$ tidak berpengaruh

H1 : $\beta_1 > 0 \rightarrow$ berpengaruh positif

H1 : $\beta_1 < 0 \rightarrow$ berpengaruh negatif.

Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Bila t-hitung $>$ t-tabel maka H0 ditolak (tidak signifikan) dan jika t-hitung $<$ t-tabel maka H0 diterima (signifikan) atau apabila nilai probabilitas (P – Value) $<$ tingkat kepercayaan (α) maka H1 diterima dan apabila nilai probabilitas (P – Value) $>$ tingkat

kepercayaan (α) maka H_1 ditolak . Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak.

3.3.4 Analisis Koefisien Determinasi (R-Square/R²)

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya menjelaskan mengenai variable-variabel independen mampu menjelaskan variable dependen dalam model analisis regresi. Nilai R² menunjukkan tingkat kemampuan variabel bebas menerangkan variabel terikat. Apabila nilai R² 60% maka variabel bebas mampu menerangkan variabel terikat sebesar 60% sedangkan 40% diterangkan oleh variabel lain diluar model. Model yang baik adalah model yang meminimumkan residual berarti variasi variabel independen dapat menerangkan variabel dependennya dengan α sebesar 0,05 (Gujarati, 2003), sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antara variabel dependen dan variabel independen. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan R², tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai t yang signifikan).

3.3.5 Analisis Uji Keseluruhan (F-Test)

Uji signifikan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu, pengeluaran pemerintah (X1), kredit sektor pertanian (X2), dan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu PDRB Sumatera Utara sektor pertanian (Y). Kriteria pengujiannya apabila nilai F-hitung < F-tabel maka hipotesis H_0 diterima yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-hitung > F-tabel maka hipotesis H_0 ditolak yang berarti seluruh variabel independen

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu atau apabila nilai probabilitas F- statistik $>$ taraf kepercayaan maka H_0 diterima dan apabila nilai probabilitas F – statistik $<$ taraf kepercayaan maka H_0 ditolak.

3.4 Defenisi Operasional

1. PDRB dalam penelitian ini adalah PDRB sektor Pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan sebagaimana diperoleh dari Sumatera Utara Dalam Angka yang dipublikasikan setiap tahun. Data PDRB sektor pertanian Sumatera Utara yang digunakan dalam satuan juta rupiah, atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010.
2. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini digambarkan dalam belanja modal sebagai pendekatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, dimana data diperoleh dari Sumatera Utara Dalam Angka yang dipublikasikan setiap tahun. Data Belanja Modal Sumatera Utara yang digunakan dalam satuan miliar rupiah, atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010.
3. Kredit adalah penyaluran kredit sektor pertanian oleh Bank Umum di Sumatera Utara. Data diperoleh dari Sumatera Utara Dalam Angka yang dipublikasikan setiap tahun. Data realisasi kredit sektor pertanian di Sumatera Utara yang digunakan dalam satuan juta rupiah, atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010.

4. Dalam penelitian ini tenaga kerja yang dimaksud adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian yang dapat dilihat pada Sumatera Utara Dalam Angka yang dipublikasikan setiap tahun. Data tenaga kerja yang dimaksud adalah data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian seminggu yang lalu dengan satuan jiwa (baik tenaga kerja terdidik maupun tidak terdidik). Tenaga kerja sektor pertanian tidak dihitung dengan model time lag, artinya data tahunan sudah menggambarkan penggunaan tenaga kerja sektor pertanian secara keseluruhan.